

**MEMBANGUN KESADARAN BERWARGANEGARA
MELALUI KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN**
*(Constructing Civic Awareness
through Student Collaboration on Development Program)*

Miko Harjanti¹, Sarwititi Sarwoprasodjo²

¹Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian;

²Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

e-mail: mikoharjanti@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this article is showing the roles of various parties in a program that involves students with the community. The contradictory effects will appear on this activity. Society can reap the benefits, in contrary they could also bear the risk of loss. Awhile for the students, these programs allegedly will enrich democratic education as well as raising social awareness. Maximum benefits for both society and student will be obtained through participatory programs, precise potential identification, and appropriate program design according to the necessity of related communities. This activity will also be more synergic with collaboration with the government program.

Keywords: civil education, democracy, participation, service learning

PENDAHULUAN

Proses pembangunan bergulir atas kontribusi dari banyak pihak. Mahasiswa mempunyai peran dalam melakukan perubahan dan pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Dengan keilmuan yang tengah digelutinya, banyak hal yang dapat disumbangkan mahasiswa bagi pembangunan masyarakat di sekitarnya. Walaupun pemerintah menanggung harapan besar sebagai aktor utama pembangunan, namun pada kenyataannya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Mahasiswa adalah salah satu komponen bangsa yang berpeluang menjembatani aspirasi masyarakat terhadap pemerintah; melakukan kontrol terhadap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah; melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang yang dikuasai; memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat; serta

mengkreasi ide dan gagasan dari penelitian yang dilakukan.

Khususnya bagi pembangunan wilayah desa, peran mahasiswa sangat dinanti pemerintah dan masyarakat. Seperti diakui oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), pemerintah tidak mungkin bisa membangun desa sendirian. Pihaknya menilai, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan berperan penting untuk mengawal dan mengawasi pembangunan desa¹. Langkah nyata Perguruan Tinggi dalam membangun desa yaitu melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Penting pula diselenggarakan program interaksi langsung mahasiswa dengan masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap

¹<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/15/04/18/nmzpyq-menteri-des-minta-mahasiswa-kawal-pembangunan-desa>.

masyarakat desa. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan (*change agent*) yaitu orang yang mampu mempengaruhi sikap orang lain untuk menerima sebuah inovasi (Rogers, 2003). Agen perubahan merupakan orang-orang profesional yang telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk dapat memengaruhi sistem sosialnya. Fungsi utama dari *change agent* adalah menjadi mata rantai yang menghubungkan dua sistem sosial atau lebih. Dengan demikian, kemampuan dan keterampilan *change agent* berperan besar terhadap diterima atau ditolaknya inovasi tertentu.

Dengan menghadirkan contoh pelaksanaan program SL dari berbagai Negara, maka tulisan ini bertujuan untuk (1) mengungkapkan manfaat program SL bagi mahasiswa maupun komunitas masyarakat yang terkait, (2) menggali teknik-teknik pelaksanaan agar program berjalan lancar, dan (3) menganalisis peran dan dukungan Pemerintah dalam rangka membangun kolaborasi yang handal untuk memberikan manfaat yang maksimal.

Service learning: Apa dan Bagaimana?

Konsep diturunkannya mahasiswa pada masyarakat dalam konteks pendidikan tinggi di luar negeri dikenal sebagai *Service Learning* (SL) yaitu metode pengajaran yang menyatukan konsep layanan masyarakat dengan pelajaran di sekolah. Bertujuan mengembangkan cara berpikir kritis, kepemimpinan, dan tanggungjawab sosial (Stephenson *et al.*, 2012). Program SL atau di Indonesia dikenal sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertujuan mengasah potensi dan kemampuan mahasiswa agar menjadi aktor sentral dalam pembangunan. Program KKN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan

solidaritas kolektif di masyarakat melalui pengalaman dunia nyata, membantu mereka menjadi anggota aktif masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan diri untuk memikul tanggung jawab pada komunitas sekaligus mempromosikan keterampilan teknis yang dikuasainya (Munter, 2002). *Service-Learning* (SL) sebagai program yang melibatkan mahasiswa kepada komunitas masyarakat disusun berdasarkan kurikulum akademis untuk mewujudkan pelayanan masyarakat (England & Marcinkowski, 2007). Pelayanan ini dapat berwujud membantu membersihkan, membangun sarana, menjaga kualitas air, audit energi, layanan langsung pada masyarakat, serta penyuluhan. Di Kentucky Amerika, sebuah program SL dikemas dengan menarik melibatkan mahasiswa jurusan gizi, petugas penyuluh gizi pemerintah, serta masyarakat sekitar (Stephenson *et al.*, 2012). Tujuannya untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui konsumsi buah dan sayur dalam makanan. Penyuluhan dikemas dalam rangkaian kegiatan kontes memasak berjudul *Plate It UP!* Mahasiswa dapat belajar pengetahuan gizi, keterampilan berkomunikasi, serta kerjasama kelompok. Secara umum SL bertujuan meningkatkan motivasi dan prestasi akademik mahasiswa, membangun analisa berpikir, dan tanggap serta bertanggungjawab terhadap masalah di masyarakat (England & Marcinkowski, 2007).

Steffany melakukan penelitian di EARTH University Costarica. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang bersama petani menerapkan rangkaian sistem pertanian terintegrasi yang tercatat dalam modul pembelajaran (Steffany, 2005). Mahasiswa melatih petani dengan teknologi pertanian budidaya pisang yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami

disekitar perkebunan. Tujuan penelitian adalah meneliti peran petani, mahasiswa, dan dosen dalam modul pembelajaran serta meneliti tingkat adopsi masyarakat terhadap sistem pertanian terintegrasi yang diberikan mahasiswa. Hasil penelitian menegaskan peran SL sebagai pintu masuk informasi, penelitian di universitas, serta keuntungan sosial yang lain.

Institusi pendidikan tinggi di Indonesia telah aktif mengirim mahasiswa ke masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), yaitu bentuk pengabdian mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi. Lebih lengkap mengenai KKN di Indonesia akan dibahas pada sub bagian selanjutnya

Apa yang Didapat Komunitas Warga?

Berbagai program SL yang menysasar masyarakat tidak dipungkiri memang mampu memberikan manfaat bagi komunitas yang dituju. Produk layanan jasa yang diberikan mahasiswa dinilai membawa kontribusi. Dari penelitian di atas, program *Plate It Up!* Berhasil menyentuh kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur dalam makanan (Stephenson *et al.*, 2012). Terlebih lagi mahasiswa mengemas program ini dengan cara yang kreatif. Penyampaian misi tidak dilakukan satu arah seperti lazimnya penyuluhan, melainkan dikemas dalam rangkaian kontes memasak dari kota ke kota, kuis berhadiah, dan lainnya. Cara yang kreatif berhasil menarik warga untuk ikut terlibat. Diakhir acara resep-resep hasil kontes dipatenkan untuk meningkatkan kebanggaan atas hasil karya sendiri. Survei yang dilakukan untuk menjaring pendapat pelaku atas

program tersebut menyebutkan hasilnya memuaskan.

Para petani responden penelitian Steffany pada tahun 2005 mengakui peran mahasiswa sebagai motivator petani untuk mempelajari keterampilan baru. Petani pun mengakui peran mahasiswa sebagai pelaku pertukaran budaya. Hasil ini disimpulkan dari penelitian dengan metode menghitung korelasi secara kuantitatif dipadu data kualitatif wawancara dengan petani, mahasiswa, dan dosen serta *Focus Group Discussion* antara mahasiswa dengan petani serta analisa konten pernyataan petani responden dalam menjelaskan hasil wawancara. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti persepsi petani terhadap efek perubahan yang dibawa mahasiswa dalam mempengaruhi keputusan petani untuk menggunakan teknologi. Dalam beberapa penelitian, komunitas warga yang mendapatkan manfaat rata-rata bersedia menerima kembali peserta SL pada tahun-tahun berikutnya.

Manfaat layanan produk yang didapat warga dari program SL secara kasat mata dapat dilihat misalnya perbaikan fasilitas umum, jalan, perpustakaan, dan sarana sekolah.

Banyak manfaat yang dapat digali dari pelaksanaan SL namun harus disadari pelaksanaannya di lapangan mungkin juga tidak seperti yang diharapkan. Program SL yang kurang terencana dikhawatirkan tidak mampu memberikan manfaat bagi masyarakat seperti yang diharapkan. Mereka kerap kali bertemu pelajar yang tidak siap menjalani program SL (Gelmon *et al.*, 1998). Pelajar semacam ini menurut mereka membawa pengalaman merugikan, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, bersikap tidak ramah, kurang berkomitmen dalam bekerja, dan sering tidak hadir di tempat. Kelakuan seperti ini tidak membantu memperbaiki keadaan justru sebaliknya memberatkan

komunitas masyarakat. Mengulas kerugian yang dialami komunitas masyarakat yang disebabkan pelajar peserta SL (Blouin dan Perry, 2009). Terutama bagi komunitas yang bergerak dalam layanan masyarakat kurang mampu, perlindungan bagi orang difabel, atau daerah pasca bencana. Responden dalam penelitian Blouin dan Perry mengungkapkan pengalaman buruk tentang perilaku pelajar yang tidak ramah dan tidak tepat waktu. Kelakuan oknum peserta SL memberikan kesan buruk dan menurunkan akuntabilitas program SL serta universitas dan organisasi partner di mata masyarakat. Terlebih lagi jika diadakan audit kinerja oleh lembaga donor yang mendanai program layanan tersebut. Kinerja layanan yang buruk dikhawatirkan akan mengganggu kerjasama selanjutnya.

Komunikasi Partisipatoris

Dalam merancang program keterlibatan mahasiswa di masyarakat perlu diketahui trend kecenderungan bidang komunikasi. Saat ini bidang komunikasi didominasi oleh dua trend pendekatan, yakni: Model Difusi Inovasi yang lebih menyerupai komunikasi satu arah dan Model Komunikasi Partisipatori yang lebih dekat dengan konsep ruang publik. Difusi inovasi dipandang sebagai transmisi informasi dari sumber ke penerima. Tujuan komunikasi adalah meningkatkan pengetahuan, melakukan persuasi, dan perubahan perilaku. Empat kelemahan pendekatan difusi inovasi adalah lemahnya pemahaman konteks budaya, bias media, pro-persuasi dan fokus pada inovasi, dan minim pembahasan mengenai kekuasaan. Mengkritisi konsep difusi inovasi dalam penyampaian pesan ke masyarakat (Leeuwis, 2006). Leeuwis menggunakan konsep baru komunikasi untuk inovasi yang tertuang dalam

bukunya *Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension*. Ia mentransformasi pemikiran *from diffusion to systems of agricultural innovation* dan menghindari istilah penyuluhan karena berbagai alasan, dan menggunakan istilah baru komunikasi untuk inovasi (Leeuwis, 2006). Latar belakang pemikiran Lewis adalah karena inovasi teknologi bisa datang dari banyak sumber. Berkembangnya model saling ketergantungan dan kerangka kerja inovasi mendorong berbagai pihak untuk turut terlibat. Tidak hanya peneliti dan penyuluh tetapi juga pengguna teknologinya, perusahaan swasta, NGO, dan infrastruktur pendukung seperti pemasaran dan kredit. Leeuwis pun melihat pentingnya proses belajar sebagai sebuah evolusi penemuan baru yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat setempat.

Sementara itu, pendekatan partisipatori berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya. Komunikasi dua arah berlangsung apabila terdapat umpan balik dari setiap partisipan baik secara verbal maupun non verbal. Salah satu kunci penerapan komunikasi partisipatif adalah diselenggarakannya *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk mengidentifikasi potensi, kendala, dan kebutuhan komunitas yang dituju (Syahyuti, 2006).

Kecenderungan pendekatan komunikasi pembangunan *top-down* kini beralih menjadi *bottom-up* yaitu pendekatan pembangunan dengan ciri keputusan yang berorientasi pada rakyat. Pendekatan ini membuka partisipasi masyarakat dan diskusi yang terbuka dengan menekankan pemberdayaan. Pendekatan semacam ini dapat juga disebut model komunikasi partisipatif. Dalam

penelitian di Teluk Bintuni telah ditemukan bahwa pengembangan komunikasi partisipatif dalam komunikasi kelompok dapat menciptakan iklim komunikasi yang merangsang para partisipan berani mengeluarkan pendapat atau ide pembangunan (Tahoba, 2011). Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Muchtar K pada tahun 2014 tentang penerapan komunikasi partisipatif dalam program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) yang dinilai dapat meningkatkan keputusan petani untuk mengadopsi penerapan teknologi usaha tani padi.

Dalam program yang menerjunkan mahasiswa ke masyarakat desa penyuluh pasti akan terlibat. Penyuluh yang sehari-hari berkedudukan sebagai *agent of change* memainkan peran penting dalam proses penyampaian pesan pembangunan di bidang pertanian. Kini, dalam paradigma penyuluhan baru, petani memiliki kontrol yang lebih untuk menentukan informasi apa yang mereka butuhkan. Mahasiswa dan penyuluh perlu menyesuaikan paradigma dengan merubah metodologi komunikasi yang sebelumnya *linear model*, *top down*, dan searah menjadi model partisipatif dan *bottom-up*. Jadi komunikasi lebih merupakan *demand-pull* dibandingkan *science-push*. Kelompok-kelompok tani harus menjadi wadah perubahan pokok yang berkaitan dengan paradigma baru ini. Artinya, penyuluh dan mahasiswa lebih sebagai fasilitator dibandingkan sebagai seorang ahli (*experts*) dalam ilmu dan teknologi. Dibutuhkan pula perubahan struktur kelembagaan, yaitu lingkungan yang mampu mendorong kerjasama dan koordinasi melalui pengembangan struktur kelembagaan (Syahyuti, 2014). Pergeseran *trend* cara penyuluhan kini yang lebih menekankan pada kualitas dan intensitas interaksi

antara agen dengan masyarakat dibandingkan cara lama yang mengandalkan penyampaian pesan secara *top-down* jenjang hirarkis yang dirumuskan Rogers (2003) (Swanson, 1997). Penyuluhan sebagai seperangkat fungsi yang dapat dijalankan oleh beragam pihak, pada berbagai level, tanggung jawab penyebaran informasi bukan tanggung jawab pemerintah saja (Leewis, 2006). Untuk itu mahasiswa, sebagai wakil non pemerintah, hadir bersama-sama dengan penyuluh bekerja untuk memperkuat rantai komunikasi pembangunan. Mahasiswa membangun kedekatan dengan tinggal di tengah masyarakat dan berhubungan intensif setiap hari selama pelaksanaan program. Penyuluh dan mahasiswa bermitra dalam pendampingan petani dalam proses perencanaan dan pelaksanaan usaha tani, introduksi teknologi, dan kelembagaan petani.

Program SL harus mampu membangun komunikasi partisipatif di masyarakat secara kreatif. Tentu diawali dengan identifikasi masalah agar program sesuai kebutuhan masyarakat. Cara kreatif dalam menyampaikan misi akan mengundang ketertarikan masyarakat. Misalnya dalam program *Plate It Up!* (Stephenson *et al.*, 2012). Mengemas program komunikasi dalam suatu kontes atau perlombaan adalah cara efektif menarik perhatian. Lebih menarik lagi jika menghadirkan artis atau tokoh publik untuk turut menyampaikan pesan. *Event* keagamaan bisa juga digarap untuk mendekati masyarakat. Misalnya dengan memanfaatkan saat sebelum buka dan sahur untuk berkumpul bersama warga dan memberikan pesan-pesan program. Beberapa program menyediakan *reward* atau penghargaan berupa *souvenir* bagi warga agar menjadi dorongan semangat untuk menerapkan pesan. Media komunikasi pun sangat

strategis untuk menjadi sarana penyampaian program. Pilihan yang paling mudah yaitu memanfaatkan media sosial internet, misalnya jaringan *group whatsapp*, *line*, *blackberry messenger*, atau *facebook* untuk menyebarkan pesan. Pemanfaatan media harus benar-benar sesuai dengan konteks masyarakat yang dituju dan sesuai dengan teknologi yang biasa mereka gunakan. Pada akhirnya pemilihan cara yang kreatif dan menarik akan mengundang partisipasi warga untuk ikut serta.

Mahasiswa, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Demokrasi

Mahasiswa adalah penggerak perubahan di masyarakat. Semangat muda yang dimiliki mahasiswa erat terkait dengan *activism* yaitu tindakan di luar rutinitas atau kebiasaan (Martin, 2007). Semangat ini dapat terwujud kepedulian di berbagai aspek baik politik, lingkungan hidup, perburuhan, ataupun isu-isu kemasyarakatan lain yang berlangsung rutin dan cenderung merugikan. Dalam studi komparatifnya di beberapa negara menyimpulkan bahwa *activism* yang diprakarsai mahasiswa telah banyak menggerakkan masyarakat (Altbach, 1989). Menurutnya mahasiswa secara tradisi diterima masyarakat karena dipandang sebagai elemen politik bangsa yang penting.

Mahasiswa dalam keterlibatannya sebagai warga negara (Prentice, 2007). Prentice mencermati pengaruh program SL yang diselenggarakan pada sembilan institusi pendidikan tinggi di USA dengan responden mahasiswa peserta SL dan membandingkan dengan bukan peserta SL. Kegiatan SL yang dirancang sebagai wadah partisipasi aktif mahasiswa dalam bermasyarakat dengan membangun komunitas yang berkomitmen, berperilaku membangun,

dan mendapatkan informasi terkini. Program SL dirancang untuk mempertemukan kebutuhan komunitas lokal dengan tujuan akademik. Kegiatan SL menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bermasyarakat, meningkatkan pengetahuan politik, serta menjembatani konten akademik dengan pengalaman di lapangan. Penelitian Prentice pada tahun 2007 membuktikan peserta SL mempunyai kesadaran lebih tinggi mengenai keterlibatannya sebagai warga Negara baik secara politik maupun partisipasi dalam komunitas. Peserta SL menyatakan kesadarannya untuk memilih dalam pemilu, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan aktif dalam lembaga masyarakat.

Hal serupa juga diteliti oleh Owen pada tahun 2000 yang mengungkapkan efek positif SL terhadap sosialisasi politik bagi mahasiswa. Mengapa SL mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara (Campbell, 2000). Menurut Campbell dua hal ini terkoneksi oleh hubungan timbal balik. Modal sosial meliputi jaringan, norma, dan kepercayaan sosial memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Mereka yang percaya keuntungan timbal balik yakin bahwa keuntungan yang didapat kini harus dibayar di masa depan dan sebaliknya pengorbanan saat ini bisa jadi mendatangkan keuntungan di masa datang. Kepercayaan ini meningkatkan intensitas kegiatan-kegiatan sosial.

SL bukanlah sebuah solusi instan namun secara bertahap (Hunter & Brisbin, 2000). Program ini diharapkan memberikan andil untuk mengatasi apatisme pelajar terhadap kehidupan politik Negara, ketidakpedulian terhadap kewajiban sebagai warga Negara dan kurangnya dukungan pelajar pada pelaksanaan demokrasi partisipatif

dengan latar belakang *pluralism* warga. Dalam penelitiannya, mengevaluasi efek program SL pada pembentukan sikap politik mahasiswa dengan menggunakan studi panel pada hasil *pretest* dan *posttest* penilaian sikap mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut dibandingkan mahasiswa yang tidak mengikuti (Hunter & Brisbin, 2000). Penelitiannya dikembangkan di tiga institusi perguruan tinggi di Virginia Barat selama dua semester. Penelitian mereka menyebutkan, bahwa pelajar yang telah bergabung dalam program SL lebih mengenal komunitasnya selanjutnya mampu mengembangkan keterampilan akademis dan merasakan kepuasan telah berbuat sesuatu bagi komunitasnya. Pelajar alumni program SL juga menyatakan memiliki keinginan lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pertemuan warga dan mengembangkan keterampilan mendengar.

Program SL nampaknya dapat meningkatkan kemampuan berdemokrasi bagi mahasiswa dalam tiga hal, yaitu: meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap politik, perbedaan suku, serta meningkatkan kepedulian terhadap masalah-masalah komunitas seperti kemiskinan, kelaparan, meningkatkan pengetahuan politik, serta memperkuat tanggung jawab sebagai warga Negara (Hunter & Brisbin, 2000).

Namun untuk mencapai hasil tersebut, keterlibatan instruktur untuk menggarisbawahi manfaat SL dengan membantu peserta untuk mengartikan arti dan menganalisa pengalaman yang mereka dapat di lapangan (Hunter & Brisbin, 2000). Menurut cara yang berbeda dalam menyelenggarakan serta mengevaluasi program SL dapat memberikan hasil yang berbeda terhadap pelajar.

Aksi SL menghubungkan universitas dengan masyarakat dan memperkuat kemauan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat. Kemauan ini dapat dibangun melalui perencanaan kurikulum. Dosen dan instruktur harus mampu menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat mahasiswa yaitu belajar sambil membantu masyarakat. Benefit bagi mahasiswa melebihi pengorbanan yang mereka lakukan yaitu biaya, tenaga dan waktu tambahan untuk terlibat dalam aksi SL.

KKN di Indonesia

Arti SL dalam terminologi dunia pendidikan tinggi di Indonesia mirip dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Seperti juga SL, program ini memiliki tujuan dan standar tertentu untuk menerapkan kurikulum pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Program KKN yang baik tentunya bukan hanya menghadirkan mahasiswa ke tengah masyarakat namun harus mampu menghadirkan pula program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Program Kuliah Kerja Nyata harus mampu menasar kebutuhan komunitas. Mahasiswa harus belajar merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi kegiatan bersama sama dengan komunitas masyarakat yang dituju.

Kuliah Kerja Nyata diprakarsai tiga Perguruan Tinggi pada tahun 1971, yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas. Pada awalnya melaksanakan kegiatan yang merupakan proyek perintis yang dikenal dengan nama "Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat"². Selanjutnya program ini makin dipertegas setelah Dirjen Pendidikan Tinggi mengembangkan suatu kegiatan pengabdian kepada

²<http://www.unhas.ac.id/kkn/sejarah/>

masyarakat oleh mahasiswa di perguruan tinggi secara nasional. Awalnya, Dikti menggelar Seminar Nasional di Yogyakarta pada tanggal 17-18 November 1972 yang membahas Proyek Perintis “Pengabdian Kepada Masyarakat” yang diikuti oleh 13 Perguruan Tinggi dari 3 Universitas Perintis ditambah dengan 10 perguruan tinggi diikutkan pada tahun akademik 1973/1974, dan disepakati kegiatan tersebut diberi nama Kuliah Kerja Nyata.” Program KKN pertama kalinya dilaksanakan pada tahun akademik 1973/1974 oleh 13 Perguruan Tinggi kemudian tahun 1974/1975 diperluas menjadi 15 perguruan tinggi. tahun 1975/1976 menjadi 29 perguruan tinggi. Sejak tahun 1976/1977 semua Perguruan Tinggi Negeri dan sebagian besar perguruan tinggi swasta telah menyelenggarakan KKN.

Salah satunya yang menarik untuk diangkat adalah pelaksanaan KKN di Universitas Duta Wacana Yogyakarta. Untuk merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pihak universitas memberikan sesi pembekalan pada mahasiswa (Krisnawati, 2009). Selanjutnya selama dua minggu mahasiswa diberikan waktu untuk mengamati komunitas yang dituju dan berkonsultasi dengan pembimbing lapangan. Kemudian mahasiswa mempresentasikan proposal di depan pembimbing dan perwakilan komunitas warga sebelum program dilaksanakan. Unikny, komunitas warga berhak untuk menolak program yang diajukan jika memang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

KKN di Indonesia pun sangat berperan dalam program-program pasca bencana. Pihak universitas terdekat lokasi menurunkan mahasiswa untuk membantu program pemulihan trauma atau pembangunan perekonomian daerah pasca bencana Tsunami Aceh

maupun gempa di Yogyakarta dan Padang.

Menggabungkan dengan Program Kementerian

Kurikulum SL pun dapat digabungkan dengan program pemerintah. Seperti diungkapkan di atas bahwa beberapa kementerian merancang program yang melibatkan mahasiswa untuk turut serta. Benefit yang diharapkan pihak kementerian tentunya sukses program serta kinerja kementerian terkait. Masyarakat pun diharapkan mendapat bantuan bagi peningkatan pemberdayaannya. Sementara itu mahasiswa pun berkesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah sekaligus meningkatkan kepedulian mereka sebagai sebagai warga Negara di tengah masyarakat. Pihak Universitas penyelenggara juga diuntungkan dalam merencanakan kegiatan dan dana tersedia akan lebih besar dengan bantuan dari Kementerian. Dukungan dana dapat meningkatkan penyediaan sarana prasarana program. Banyak pihak nampaknya mendapatkan manfaat dari penggabungan program kementerian dalam kurikulum KKN.

Kementerian Pertanian merangkul Universitas dalam Program Pendampingan Petani oleh Mahasiswa. Mahasiswa terpilih karena kapasitas keilmuan khususnya di bidang pertanian. Ada 8.500 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang dilibatkan dalam program Pemuda Tani tersebut. Mereka memiliki tugas untuk menghidupkan lahan-lahan pertanian dan menggerakkan produksi lebih meningkat.³ Salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama petani sebagai pelaku utama

³<http://www.merdeka.com/peristiwa/guna-capai-swasembada-pangan-kementan-bentuk-pemuda-tani-indonesia.html>

pembangunan pertanian. Dalam implementasi kegiatan tersebut, mahasiswa diperlukan sebagai tenaga pendamping yang penuh semangat untuk berpartisipasi aktif dalam membantu peningkatan kinerja penyuluh pertanian. Tujuan Pendampingan Mahasiswa adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Upaya tersebut patut didukung dengan implementasi secara nyata di lapangan dengan memberikan perhatian yang serius dari semua pihak termasuk perguruan tinggi sebagai komunitas masyarakat akademis dalam hal ini adalah civitas akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Selain itu juga didukung oleh alumni dan tenaga pemantau atau supervisor. Program Pendampingan oleh Mahasiswa dalam upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai melibatkan lima Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian dan 14 Perguruan Tinggi yang ada di 16 provinsi sentra produksi padi, jagung dan kedelai.

Kementerian lain pun secara aktif membuka program kerjasama dengan universitas untuk memwadahi keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan untuk membawa pesan pembangunan kepada masyarakat. Walaupun kegiatan-kegiatan di bawah ini tidak terintegrasi dalam kurikulum kampus namun sangat berarti dalam menjembatani hubungan mahasiswa dengan masyarakat. Sebut saja di antaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) yang menggandeng mahasiswa untuk aktif mengawal pengelolaan dana desa. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menggelar program berjudul Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) dengan tujuan melibatkan pemuda dalam pembangunan desa. Target yang

dibidik pada tahun 2015 adalah seribu orang sarjana yang ditempatkan di 500 desa, 251 kecamatan, 66 kabupaten/kota di 33 provinsi.⁴

Mahasiswa dan Pemberdayaan Petani

Peningkatan kapasitas para petani supaya menjadi petani yang mandiri dan berdaulat terus diupayakan. Mencermati bahwa sebagian besar petani di Indonesia memiliki sumber daya yang sangat terbatas, terutama luas lahan, maka untuk menuju kemandirian dan kedaulatan, para petani didorong untuk bersatu dalam suatu organisasi atau kelompok. Melalui kelompok dapat dibangun suatu sinergi antar anggota sehingga terwujud peningkatan kapasitas yang memungkinkan anggota kelompok mencapai tujuan yang sulit dicapai jika berusaha sendiri-sendiri (Kementan, 2013). Pemberdayaan kelompok tani termasuk misi penting program mahasiswa sehingga setiap kegiatan pendampingan harus terkait dengan upaya peningkatan kapasitas, kinerja, dan kemandirian kelompok tani (Kementan, 2015).

Saat ini sebagian besar petani di perdesaan telah terhimpun di dalam kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Namun diakui oleh Kementerian Pertanian bahwa sebagian besar Poktan dan Gapoktan masih termasuk kategori lemah dari segi kapasitas dan kinerjanya. Oleh karena itu, sangat diperlukan kegiatan pemberdayaan kelembagaan kelompok petani. Kehadiran mahasiswa sebagai pendamping diharapkan dapat secara aktif membantu penyuluh pertanian dalam kegiatan pemberdayaan kelompok tani. Beberapa hal penting perlu diperhatikan dalam pemberdayaan

⁴<http://jatengprov.go.id/id/siaran-pers/program-pemuda-sarjana-penggerak-pembangunan-di-perde-saan-pp3-tahun-2015>.

kelompok tani adalah penguatan pengurus, penyempurnaan aturan main (AD/ART), pembenahan administrasi, pengaktifan jadwal pertemuan, penyusunan program kerja, dan evaluasi pelaksanaan program kerja. Terciptanya aktivitas komunikasi organisasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Gapoktan sehingga Gapoktan mampu mengembangkan unit usaha yang dikelolanya dan mengembangkan kemitraan serta melakukan negosiasi dengan pihak lain untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Anggota sebagai aset utama organisasi Gapoktan perlu diperhatikan kepuasannya termasuk kepuasan dalam berkomunikasi.

Poktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani (Syahyuti, 2007). Dengan demikian karakteristik pesan yang dikomunikasikan harus jelas, lengkap dan memiliki metode yang tepat, relevan, dan terpercaya sehingga frekuensi pertemuan yang dilakukan pengurus Poktan penting untuk diperhatikan. Frekuensi pertemuan adalah seberapa seringnya pengurus melakukan pertemuan baik secara formal maupun informal seperti rapat, pelatihan, pendampingan, pembinaan, dan temu usaha pada Poktan.

Identifikasi Kebutuhan Komunitas

Hal yang perlu digarisbawahi adalah perlunya melakukan identifikasi potensi wilayah dan pendataan komunitas masyarakat. Seperti hasil penelitian Blouin dan Perry pada tahun 2009 juga McCarthy dan Tucker pada tahun 2002 menyatakan bahwa benefit bagi komunitas masyarakat tidak akan maksimal jika tujuan komunitas

masyarakat tidak sesuai dengan tujuan SL serta kurang komunikasi instruktur atau dosen dengan komunitas.

Universitas bermitra dengan komunitas dalam menentukan kurikulum SL sebelum pelaksanaan, mendiskusikan tujuan SL dengan komunitas dan mendefinisikan peran komunitas dalam program SL, serta mengatur mahasiswa yang terlibat dalam SL dengan latar belakang keilmuan yang sesuai dengan program (Blouin & Perry, 2009). Identifikasi Potensi wilayah dan agroekosistem dilakukan untuk memperoleh data keadaan wilayah dan agroekosistem dengan menggunakan data primer maupun data sekunder (STPP Bogor, 2005).

Data primer bagi SL yang digelar di bidang pertanian diperoleh di lapangan dari petani maupun masyarakat yang terkait sedangkan data sekunder diperoleh dari monografi desa atau kecamatan atau BPP dan dari sumber-sumber lain yang relevan. Identifikasi data primer menggunakan pendekatan partisipatif dan wawancara semi terstruktur menggunakan teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang digelar saat tahap persiapan program. Teknik PRA dilakukan dengan tujuan agar komponen teknologi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan setempat dengan mengidentifikasi potensi, kendala, dan kebutuhan komunitas yang dituju. Pada kegiatan PRA terungkap pola komunikasi dua arah berupa dialog antara masyarakat dan tim petugas. Komunikasi dua arah berlangsung apabila terdapat umpan balik dari setiap partisipan baik secara verbal maupun non verbal. Sementara itu, ada dua kunci utama PRA yakni analisis secara kolektif dan pendekatan yang baik (Syahyuti, 2006). Tim yang dimaksud melibatkan pihak luar yang berperan sebagai fasilitator, bukan pengontrol kegiatan, yang memotivasi

masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri. Tambahan data sekunder dapat pula diperoleh dengan cara mengumpulkan seluruh data potensi wilayah dan agroekosistem dari monografi desa atau kecamatan atau BPP juga data *Geografic Information System* (GIS) untuk memperoleh data ketinggian tempat serta jarak desa ke kota.

KESIMPULAN

Menjalani program SL memang menuntut biaya, tenaga dan waktu bagi mahasiswa namun dalam beberapa penelitian terbukti dapat memperkaya pendidikan berdemokrasi dan serta meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Manifestasi dari program SL dari berbagai Negara di dunia dan dari berbagai bidang dimulai dengan identifikasi potensi serta rancangan program yang tepat yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dilanjutkan dengan pengembangan program yang partisipatoris sesuai kebutuhan komunitas masyarakat. Program SL makin berdayaguna dengan kerjasama yang dijalin bersama Kementerian terkait untuk mewujudkan layanan yang terintegrasi.

Dari literasi jurnal diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Pembagian kerja nelayan pesisir berdasarkan gender sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama pada saat nelayan tidak pergi mencari ikan di laut,
2. Relasi patron-klien sulit untuk dihilangkan apabila nelayan tidak memiliki konsep diri yang kuat untuk berdaya dan mandiri,
3. Komunikasi kelompok nelayan dapat dilakukan dengan efektif apabila pemimpin kelompok sekaligus sebagai *opinion leader* mampu

berkomunikasi dengan anggotanya dengan menggabungkan 'kearifan lokal' dan pengetahuan tentang pemberdayaan dan kemandirian untuk nelayan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Altbach, Phillip G. 1989. Perspectives on Student Political Activism. *Comparative Education*. 25:1, 97-110
- Blouin D, Perry E. 2009. Whom Does Service Learning Really Serve? Community-Based Organizations Perspectives on Service Learning. *Teaching Sociology*. 37: 120-135.
- Campbell DE. 2000. Sosial capital dan Service learning. *PS Polit*. 33 (3):641-645.
- Dragon S. 2005. Perceptions of Farmers, Students, and Faculty Regarding University-Based Externsion: A Case Study From Earth University [Tesis]. Costa Rica (CR) : EARTH University.
- England Y, Marcinkowski T. 2007. Environmental Service-Learning Programs in Florida High Schools and Colleges: Nature, Status and Effects as Determined by Statewide Program Cencus. *The Journal of Environmental Education*. 38(4): 51-60.
- Gelmon, Holland, Seifer, Shinamon, Connors. 1998. Community university Partnership for Mutual Learning. *Michigan Journal of Community Service Learning*. 5:97-107.
- Hunter S, Brisbin RA. 2000. The Impact of Service Learning on Democratic and Civic Values. *Political Science and Politics*. 33 (3): 623-626.
- Muchtar K. 2014. Komunikasi partisipatif pada Sekolah Lapang Pengelola Tanaman Terpadu (SLPTT) di Desa Abbokongeng

- Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [Kementan] Kementerian Pertanian RI. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Jakarta (ID): Kementan RI.
- _____. 2015. Modul Pendampingan Mahasiswa dalam Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai. Jakarta (ID): Kementan RI.
- Krisnawati LD. 2009. Service learning in Duta Wacana Christian University: Past, Present, and Future States. *New Horizon in Education*. 57:3, 74-81
- Leeuwis C. 2006. Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension. New York (US): Blackwell Publishing.
- Martin, Brian. Activism, Social and Political. Dalam Anderson and Herr (ed). 2007. *Encyclopedia of Activism and Social Justice*. Thousand Oaks (US): Sage, 19-27
- McCarthy dan Tucker. 2002. Encouraging Community Service through Service Learning. *Journal of Management Education*. 26:6, 629-647
- Munter J. 2002. Linking Community and Classroom in Higher Education: Service-learning and Student Empowerment. *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*. 10:2, 151-164.
- Owen., Diana. 2000. Service Learning and Political Socialization. *Political Science and Politics*. 33:3, 638-640
- Prentice, Mary. 2007. Service Learning and Civic Engagement. *Acad Quest*. 20 : 135-145
- Rogers EM. 2003. Diffusion of Innovations (5th ed.). New York (US): Free Press
- Stephenson T, Stephenson L, Mayes L. 2012. Engaging Student in Service Learning through Collaboration with Extension: A Recipe for Success with Community partners. *NACTA Journal*. December 2012.
- [STPP] Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Bogor. 2005. Diktat Participatory Rural Appraisal bagi Penyuluh Pertanian. Bogor [ID]: STPP Bogor.
- Swanson BE. 1997. The Changing Role of Extension in Technology Transfer. In, B.E. Swanson & A.J. Sofranko (Eds.), *Improving Agricultural Extension: a Reference Manual* (pp. 85-92). Rome, Italy.
- Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta (ID): PT. Bina Rena Pariwara.
- _____. 2014. Peran Strategis Penyuluh Swadaya dalam Paradigma Penyuluhan Pertanian Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 32(1): 43-58.
- Tahoba A. 2011. Strategi Komunikasi Dalam Program Pengembangan Masyarakat. (Kasus Program Community Development Pada Komunitas Adat yang Terkena Dampak Langsung Proyek LNG Tangguh di Sekitar Teluk Bintuni, Papua Barat). Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Pulau-Pulau Kecil.